

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagaimana ditegaskan dalam undang undang dasar tahun 1945 pasal 33, bahwa perekonomian ini disusun berdasarkan usaha secara bersama secara atas asas kekeluargaan, dan pasal34 mengenai fakir miskin dan anak terlantar ini dilindungi oleh negara. Hal ini dapat ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut model negara kesejahteraan. Kesejahteraan sosial sendiri sebagai suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan dengan baik tanpa adanya suatu permasalahan dalam kesejahteraan.(Suradi, 2007)

Kesejahteraan sosial sendiri ini memiliki arti bahwahak bagi setiap warga negara yang dimana kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan akhir dari suatu aspek pembangunan, dan ini dilakukan oleh negara secara bersama-sama dengan masyarakat dan kesejahteraan sosial juga merupakan suatu indikator kinerja pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, pertahanan dan keamanan tidak dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk fakir miskin, pengangguran, dan angka putus sekolah cukup tinggi, kesenjangan dan konflik sosial meluas dan meningkatnya perilaku anti sosial tidak dapat dikendalikan.

Pembangunan daerah pada hakikatnya dianjurkan tidak hanya memusatkan pada suatu pertumbuhan ekonomi saja namun harus mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari suatu proses pembangunan daerah tersebut. Para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomisehingga ini dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan perkapita akan meningkat sehingga cara otomatis akan meningkatkan kemakmuran rakyat. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.(Kasim, 2021)

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu dari faktor penyebab terjadinya pertambahan kebutuhan yang beragam, yang dimana seseorang tidak hanya cukup memiliki satu kebutuhan saja, akan tetapi memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan juga fasilitas pendidikan yang terpenuhi. Namun faktanya tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa kendala masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena faktor ekonomi yang minim.

Kesenjangan pembangunan di Sumenep disamping memicu tingginya kemiskinan juga menjadi sebab tingginya mobilisasi penduduk ke daerah kota-kota besar seperti Jakarta bahkan ke luar negeri untuk mencari peruntungan.

Namun upaya yang tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian dan pengetahuan yang kurang maksimal dapat menjadikan nasib mereka hanya sebagai pekerja atau buruh kasar. Mereka yang terlanjur datang ke kota dan tidak memiliki bekal yang cukup untuk mendapat pekerjaan yang layak, bekerja serabutan dan tidak tetap. Walaupun mereka hanya bekerja serabutan atau tidak tetap, tetapi mereka tetap bertahan untuk tinggal di suatu kota, karena yang mereka pikir lebih mudah mendapatkan uang di kota daripada di desa walau hanya bekerja secara tidak tetap. (Ikmal, 2019)

Dalam permasalahan suatu kesejahteraan sosial atau yang sering disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini, terdapat beberapa jenis masalah kesejahteraan sosial, diantaranya fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemulung, lanjut usia yang terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, wanita rawan sosial ekonomi, bekas narapidana, pengguna napza, korban bencana alam, pekerja migran yang terlantar. Namun dari berbagai permasalahan yang ada disini peneliti fokus dalam membahas fakir miskin.

Berbicara mengenai fakir miskin, angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur saja masih sangat tinggi. Oleh karena itu persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa Timur pada maret tahun 2022 mencapai 1,721 juta jiwa untuk penduduk kota sementara untuk pedesaan 2,459 juta pada maret 2022.

Namun dengan Kabupaten Sumenep berada pada angka kemiskinan 20,51%. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan untuk seluruh masyarakat itu sendiri belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari belum meratanya pembangunan di setiap daerah, terutama daerah-daerah pelosok atau pinggiran, yang sering luput dari perhatian Pemerintah.

Dalam permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Sumenep sendiri, penyandang masalah kesejahteraan sosial meningkat dengan adanya pasca covid-19. Berdasarkan catatan data di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumenep tercatat mengalami peningkatan. Namun, ini disebabkan oleh covid-19 yang berdampak pada perekonomian masyarakat yang menjadi terpuruk.

Permasalahan yang muncul adalah setiap individu dalam sebuah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) cenderung memiliki lebih dari satu kategori jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini akan mempengaruhi dalam penentuan jenis bantuan yang layak diterima, dimana sebaiknya setiap individu hanya dikategorikan ke dalam satu jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di sisi lain, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kembali bertambah tampaknya juga berkaitan dengan terjadinya proses marginalisasi dan polarisasi antarwilayah yang makin lebar. Ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, tidak jarang terjadi mereka kemudian sengaja atau tidak sengaja terpaksa menelantarkan anaknya, hak anak untuk

memperoleh pendidikan yang layak putus di tengah jalan karena keterbatasan ekonomi dan tekanan kemiskinan.

Pada saat membuat suatu kebijakan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan, salah satunya adalah kebijakan dari strategi yang dibuat untuk menyikapi permasalahan kelompok yang direncanakan dari pengaturan yang telah ditentukan. Untuk situasi ini, Bantuan Sosial Pemerintah Sumenep mengatur beberapa proyek, misalnya, program penguatan untuk keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah. Program pembinaan untuk individu yang tidakmampu dan cedera. Program ini secara eksplisit untuk membantu pendanaan dan pembinaan masyarakat miskin dan jaringan fakir miskin. Sejauh manfaat program penguatan keluarga tidak mampu, program bantuan dan pemulihan pemerintah, program peningkatan anak-anak yang diabaikan, program pelatihan untuk individu cacat dan cedera yang diberikan kepada jaringan penerima dapat dianggap berhasil dan berdaya, misalnya program penguatan untuk keluarga kurang mampu, program administrasi dan program melalui pemberdayaan masyarakat.

Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui suatu pemberdayaan.

Dari sinilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kab.Sumenep.

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka masalah ini dapat dirumuskan seagai berikut : Bagaimana Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan peneliian adalah untuk mengetahui Penganggulan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh dinas sehingga dapat memberikan pengetahuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti berharap menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi penanggulangan kesejahteraan sosial dalam

mewujudkan keajahteraan sosial dengan menggunakan teori yang diperoleh selama masa kuliah.

b. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari: Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

1. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Grand theory dan kerangka teori yang membahas mengenai teori administrasi publik, administrasi pembangunan, penanggulangan, pmks, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi : Fokus penelitian Lokasi penelitian, Sumber data, Instrumen penelitian, Subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisa data dan Keabsahan data.

Bab IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Memaparkan secara umum tentang objek penelitian yang mana berupa geografis desa, demografis desa, struktur organisasi, dinamika politik, visi dan misi Kepala Desa.

Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan dan menjelaskan hasil data dari penelitian serta membahas tentang data dari penelitian yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab VI PENUTUP

Memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

